



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	22 (dua puluh dua)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI.
Hari, Tanggal	:	Selasa, 7 Juni 2022
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Faisol Riza/ Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Pembahasan RKP dan RKA TA 2023; 2. Usulan BUMN penerima PMN TA 2023; dan 3. Usulan tentang rencana IPO/Right Issue.
Hadir	:	1. 44 orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri BUMN RI, Erick Tohir. beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI pada pukul 10.26 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 7 Juni 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian BUMN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp232.004.494.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp162.716.874.000 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*)
 - b. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp69.287.620.000 (*Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 sebesar Rp79.700.000.000 (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah*) untuk dapat mendukung pencapaian target kinerja 2023 yang terdiri atas :
 - a. Peningkatan Kapasitas *Executive Talent Management* sebesar Rp1.400.000.000 (*Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*)
 - b. Renovasi Gedung serta Kebutuhan operasional lainnya sebesar Rp25.000.000.000 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*)
 - c. Pembangunan PLTS sebesar Rp6.000.000.000 (*Enam Miliar Rupiah*)
 - d. Penguatan Sistem Informasi sebesar Rp38.300.000.000 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*)
 - e. Implementasi *Big Data Infrastructure* sebesar Rp3.000.000.000 (*Tiga Miliar Rupiah*)
 - f. Biaya dan lain-lain (Peningkatan Program TJSL, *Benchmark* SDG's Perbaikan tata kelola BUMN, dan *Monitoring* PSN) sebesar Rp6.000.000.000 (*Enam Miliar Rupiah*)

3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara Tunai tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp10.000.000.000.000 (*Sepuluh Triliun Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT (Penugasan).
 - b. PT LEN Industri (Persero)/Defend ID sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar,

- pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata (Pengembangan Usaha)
- c. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp2.000.000.000.000 (*Dua Triliun Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (Pengembangan Usaha).
 - d. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp30.561.000.000.000 (*Tiga Puluh Triliun Lima Ratus Enam Puluh Satu Miliar Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II. Angka PMN Rp.30,56 T ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp.36,78 T dikarenakan optimasi pendanaan dari kerjasama *Asset Recycling* jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II) (Penugasan).
 - e. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/In Journey sebesar Rp9.500.000.000.000 (*Sembilan Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) yang akan digunakan untuk Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika (Penugasan dan Pengembangan Usaha).
 - f. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp6.000.000.000.000 (*Enam Triliun Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo (Penugasan).
 - g. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.100.000.000.000 (*Empat Triliun Seratus Miliar Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB.
 - h. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan (Pengembangan Usaha).
 - i. Perum DAMRI sebesar Rp867.000.000.000 (*Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan (Penugasan dan Pengembangan Usaha).
 - j. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav Indonesia sebesar Rp790.000.000.000 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Miliar Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka mencapai *seamless Air Traffic Management* (ATM) di kawasan

regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem (Penugasan).

4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara Non Tunai tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT LEN Industri (Persero)/Defend ID sebesar Rp838.400.000.000 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) yang akan digunakan memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.
 - b. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp2.609.070.000.000 (*Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah*) yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.

5. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami inisiatif *Corporate Action*, antara lain :
 - a. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* yang akan digunakan untuk Pembayaran Utang dan Pengembangan Usaha dan Komisi VI mengusulkan Kementerian BUMN untuk mempertimbangkan keterlibatan BUMN lain dalam pelaksanaan aksi korporasi ini.
 - b. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan Inbreng Semen Baturaja pada Semen Indonesia melalui skema *Right Issue*.
 - c. PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*).
 - d. PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp1.980.000.000.000 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*).
 - e. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar

Rp2.980.000.000.000 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*) dari cadangan pembiayaan investasi.

- f. PT Semen Kupang akan menjual Saham Pemerintah dengan metode Privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor.
 - g. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp7.500.000.000.000 (*Tujuh Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) dari cadangan pembiayaan investasi, serta pendanaan *new investor* untuk restrukturisasi dan transformasi selama tahun 2022-2023 (*Right Issue Tahap II*).
6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.21 WIB.

MENTERI BUMN RI

Ttd.

ERICK THOHIR

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**ARIA BIMA
A-189**